

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Penelitian Purwani (2010) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan. Tujuan penelitian tersebut adalah mencari bukti empiris pengaruh GCG dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah EVA momentum perusahaan. Sedangkan variabel independennya adalah penerapan GCG, Growth, dan SIZE. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung dari penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan atau nilai EVA Momentum.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) melakukan penelitian tentang Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance, kepemilikan yaitu institusional, kepemilikan manajerial, kehadiran independen direktur dan ukuran direktur dengan manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Cash Flow Return On Asset*. Sedangkan variabel independennya adalah mekanisme corporate governance, kepemilikan yaitu institusional, kepemilikan manajerial, kehadiran independen direktur dan ukuran direktur dengan manajemen laba. Penelitian tersebut juga meneliti pengaruh *consequensies* manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini

mengambil sampel dari 30 perusahaan di sektor manufaktur di Bursa Efek Jakarta, yang diterbitkan dalam laporan keuangan 2001-2004. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda dan regresi tunggal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, adanya independen dari direktur berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, ukuran sutradara belum berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, secara simultan dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kehadiran independen direktur dan ukuran direktur memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan manajemen laba memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

Penelitian Widyati (2013) tentang Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan. Sampel penelitian diambil berdasarkan metode purposive sampling dengan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI berturut-turut dari tahun 2008-2011, perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008-2011 serta perusahaan sektor properti dan real estate yang memiliki kecukupan data mengenai jumlah dewan direksi, dewan komisaris

independen, jumlah komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Secara parsial komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Tertius dan Christiawan (2015) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh antara good corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan tahun 2011-2013. Data dalam penelitian tersebut dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran

perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian Hastuti dan Soegijapranata (2005) tentang Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan. Tujuan penelitian tersebut adalah menguji pengaruh mekanisme GCG dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah proporsi kepemilikan, disclosure, dan manajemen laba, sedangkan variabel dependennya adalah TobinsQ. Populasi dalam penelitian tersebut adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 dan 2002. Sampel penelitian diambil atas dasar purposive sampling, dengan kriteria termasuk dalam daftar LQ-45 berturut-turut selama periode pelaporan keuangan tahun 2001 dan 2002. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan ditolak, kemudian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan kinerja perusahaan, serta terdapat hubungan yang signifikan antara *disclosure* dengan kinerja perusahaan.

Penelitian Wicaksono dan Hapsari (2016) Tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Saham Perusahaan Peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Periode 2009-2013. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja saham

perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan variabel *good corporate governance* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan kinerja saham sebagai variabel dependen. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model panel yang digunakan adalah *Pooled Least Square Model* (PLS) menggunakan software Eviews 8.1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja saham. Begitu juga secara parsial, *good corporate governance* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja saham dan ukuran perusahaan juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja saham.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan principal dengan agent. Teori keagenan ini membuat sebuah model mengenai suatu hubungan kontraktual antara manajer dengan pemilik Principal mendelegasikan suatu tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab agent dan principal diatur dalam kontrak kerja yang disepakati bersama. Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agent

sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai agent bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak principal melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal.

Menurut Eisenhardt (dalam Arifin, 2005) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia (human assumptions), asumsi tentang keorganisasian (organizational assumptions), asumsi tentang informasi (Information assumptions).

Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *self-interest*, yaitu sifat manusia yang mengutamakan kepentingan sendiri, *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, *risk aversion* yaitu sifat manusia yang cenderung memilih menghindari resiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : konflik sebagai tujuan antar partisipan, efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas ,asimetri informasi antara principal dan agen.

Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi adalah komoditas yang dapat dibeli. Pihak manajemen atau manajer, merupakan kunci dari segala sumber informasi yang beredar di lingkungan perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan daripada principal. Dengan informasi yang

dimilikinya tersebut, manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik. Para agen berkepentingan untuk mendapatkan imbalan yang sesuai untuk kinerjanya dalam mengoperasikan perusahaan. Pihak principal sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada agent untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap agent oleh para principal, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh prinsipal tidak memuaskan, prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Dengan demikian di dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik principal dan kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula dengan kata lain kepentingan pribadi agen sendiri.

Posisi agent sebagai pemegang kunci informasi dan principal sebagai penerima informasi dari agent dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information assymetri*), yaitu suatu kondisi dimana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*preparer*) dengan pihak principal secara umum tidak seimbang.

2.2.2. Definisi Corporate Governance

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelolaperusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakehonders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. *Organization for Economic Cooperation and Development* (2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai

sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.2.3. Prinsip Corporate Governance

Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *Corporate Governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan.

1. *Trasnparancy* Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.
2. *Accountability* Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholders lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.
4. *Idependency* Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran atau *Fairness* Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

2.2.4. Struktur Kepemilikan

Salah satu mekanisme *corporate governance* yang digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam suatu organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan antara *principal* dan agen. Untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Semakin besar

kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Suranta dan Midiastuti (2005) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba. Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk meminimalkan konflik keagenan.

2.2.5. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-315/BEI/062000 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

2.2.6. Dewan Komisaris

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Egon Zehnder International (2000) dalam FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimal 30 persen. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik *good corporate governance*, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh anggota komisaris.

2.2.7. Ukuran Perusahaan

Menurut Yulia (2013; 21) ukuran perusahaan (*company size*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (*asset*) yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, log size, nilai pasar saham dan lainlain. Semakin besar suatu perusahaan, semakin banyak pula alternatif pembelanjaan sumber daya yang dapat dipilih. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pihak eksternal bila dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Adiningsih,

2013; 41).

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Hasil penelitian oleh Srimindarti (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi memiliki hubungan positif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Perusahaan besar cenderung untuk menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu daripada perusahaan kecil.

Kadir (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran (proksi) yang mereka gunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah dengan total aset. Bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka berargumen bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.

2.3. Perumusan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan

Untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Sigian dan Machfoedz, 2006). Suranta dan Midiastuti (2005) menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap praktik manajemen laba. Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang dapat digunakan untuk meminimalkan konflik keagenan. Tertius dan Christiawan (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sedangkan penelitian Widyati (2013) berhasil membuktikan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit merupakan pihak independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit berperan untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Komite audit juga memiliki peran untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan dan juga pelaporan keuangannya. Komite audit berperan untuk mengawasi dan

menjembatani hubungan auditor internal dan eksternal sehingga pelaporan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya komite audit, diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang relevan dan bebas dari manipulasi pihak manapun sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen. Komite audit juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan perusahaan nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Widyati (2013) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H2 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen Chtourou, et al. (2001) dalam Savitri (2010). Keberadaan komisaris independen harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh intervensi dan tekanan pemegang saham utama. Weisbach (1988) dalam Savitri (2010). Fama dan Jensen (1983) dalam Savitri (2010) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat

kepada manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen sangat penting bagi perusahaan karena dapat meminimalisir adanya tindak manajemen perusahaan yang tidak bersih dan tidak transparan. Selain itu, dewan komisaris independen memiliki peran sebagai pengawas manajemen agar tercipta *good corporate governance*. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dalam menciptakan lingkungan usaha yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, maka akan tercipta pengelolaan usaha yang baik dan akan terjadi peningkatan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Widyati (2013) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Tertius dan Christiawan (2015) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H3: Komisaris Independen (KomInd) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada asset yang dimiliki perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asset yang dimilikinya. Perusahaan dengan asset yang besar cenderung memiliki kesempatan lebih besar dalam menghasilkan laba yang menjadi tolak ukur kinerja perusahaan.

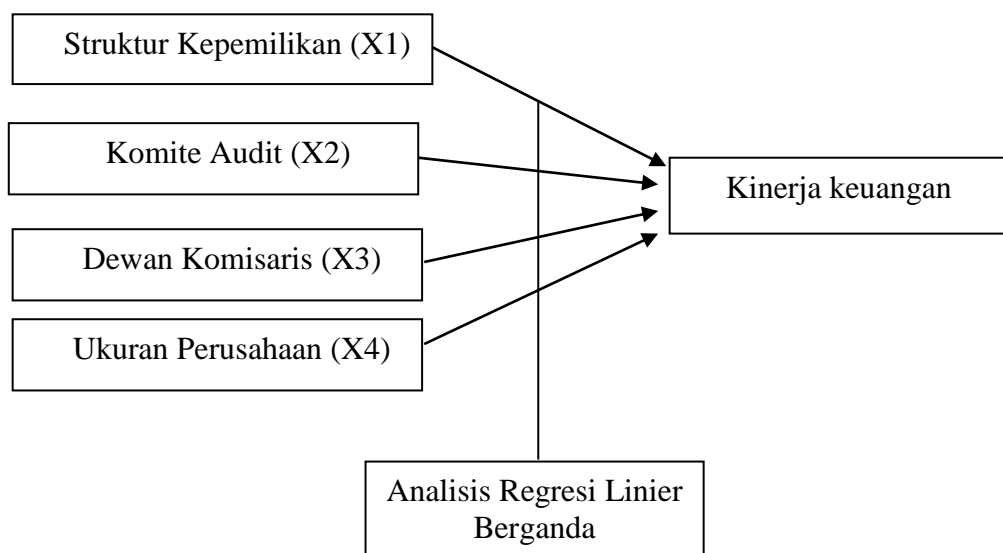
Tertius dan Christiawan (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara singkat suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah struktur kepemilikan, komite audit, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linier berganda.